PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Painan Telp. (0756) 7464131 – Fax.0756-7464085

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 050/ 192 /PSB-Bapedalitbang/VI/2019

Kepada Yth : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Barat.

Dari : Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Pesisir Selatan.

Hal : Pernyataan Kebenaran bahwa Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan belum tersedia atau belum disusun.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan/Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini menyatakan bahwa, :

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2020 Kabupaten Pesisir Selatan belum tersedia, karena baru akan disusun pada bulan Agustus Tahun 2019.
2. Sesuai pernyataan point 1 (satu), maka untuk Kelengkapan laporan Gender Analysis Pathway dan Gender Budgeting Statement (GAP-GBS) yang harus melampirkan Dokumen RKA Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa kami penuhi.
3. Berdasarkan arahan Ketua Kelompok Kerja PUG Propinsi Sumatera barat, bahwa bagi daerah yang belum menyusun RKA 2020, maka kelengkapan laporan GAP-GBS dapat melampirkan Dokumen Rencana Kerja (RK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020.
4. Berdasarkan point 3 (tiga), kami lampirkan Rencana Kerja (RK) Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Painan 19 Juni 2019

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si

NIP. 19750101 200003 1 003

GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan :	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Reviu Dokumen Perencanaan dan Laporan	
2	Output kegiatan	Rp100.000.000,-	
3	Analisa situasi		
4	Rencana Aksi	Reviu Dokumen Perencanaan dan Laporan	1. Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Laporan. 2. Menhgajukan usulan formasi PNS tenaga Fungsional Pemeriksa ke BKPSDM. 3. Pengembangan dan Peningkatan wawasan aparatur pengawasan
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Jumlah Anggaran sebesar Rp100.000.000,-
6	Dampak/hasil Output Kegiatan		Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Laporan
Program			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Sasaran Program			Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
Kegiatan			Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Latar Belakang	Dasar Hukum		APBD

	Gambaran Umum	-
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Reviu Laporan Keuangan Daerah (LKD), Reviu PPRG, Dokumen Perencanaan (RKA Awal dan Perubahan), Reviu SAKIP Pemda, Renja Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	Indikator Kinerja	Persentase RKA,GAB dan GBS, Laporan Keuangan Daerah (LKD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang baik dan sesuai aturan yang berlaku
	Batasan Kegiatan	12 Bulan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan pemahaman terhadap protap dan aturan dan melaksanakan pertanggungajawaba sesuai dengan Aturan yang berlaku.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Memberikan Solusi dan menegaskan kepada PD dan Pejabat Pengelola keuangan langsung ke PD masing-masing.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Pesisir Selatan.
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Inspektur
Jadwal		Januari s.d. Desember
Biaya		Rp100.000.000,-

Painan, 18 Juni 2019
Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk.I.
NIP. 19681017 198903 1 003

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Bapedalitbang**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM			
KODE PROGRAM	**1.18.1.18.01..16. 02**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan permendagri no 54 tahun 2010, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen prencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. - Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif - Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2018 dan 2019 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim.		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan musrenbang minim - E planning kaku dan belum mengakomodir semua komponen masyarakat **b. Penyebab Internal** - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan - waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Kurangnya pemahaman Pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang responsig gender **c. Penyebab Eksternal** - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti musrenbang - Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari pada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** .Terwujudnya sistem perencanaan daerah yang berkualitas dan partisipatif		
	2. Indikator dan Target Kinerja 100%		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 183.616.075,-**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	
		Masukan	Rp. 183.616.075,-
		Keluaran	Terselenggaranya proses penyusunan perencanaan .daerah yang aspiratif dan partisipatif
		Hasil	Tersedianya RKPD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Kegiatan 2	-	
		Masukan	Rp. -
		Keluaran	-
		Hasil	-
	Kegiatan 3	-	
		Masukan	Rp.-
		Keluaran	-
		Hasil	-

Painan, 18 Juni 2019
Kepala Bapedalitbang Kab.Pessel

PEMERINTAH KABUPATEN PESSIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

YOZKI WANDRI S.Pi.M.Si.
NIP. 19750101 200003 1 003

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2019

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KODE PROGRAM	3.00.3.00.03.01.02
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kantor baru yang berdiri pada tahun 2011 b. Luas Gedung Kantor Badan Pengelola keuangan Daerah 2.400 M2. c. Jumlah Perlengkapan Alat Rumah Tangga Lainnya seperti Gantungan Tas, Westafel, Kaca Rias Pegangan Tangan (Handle) dan tong sampah di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah sebanyak 17 Unit. d. Jumlah PNS Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah 35 Orang. e. Jumlah PNS Laki-laki sebanyak 14 Orang Perempuan 21 Orang f. Jumlah Toilet 5 (1 unit toilet kepala, 2 unit toilet laki-laki, 2 unit toilet perempuan)
	a. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1. **Akses :** masih kurangnya toilet perempuan berdasarkan jumlah pegawai dan belum tersedianya toilet perempuan yang sesuai standar 2. **Partisipasi** : Tingginya permintaan kebutuhan PNS perempuan terhadap Perlengkapan Alat Rumah Tangga Lainnya untuk Toilet khususnya Gantungan Tas , Westafel, Kaca Rias Pegangan Tangan (Handle), dan tong sampah 3. **Kontrol** : Kurangnya Perencanaan dalam pembangunan gedung kantor 4. **Manfaat** : Belum maksimalnya manfaat toilet perempuan yang ada. **b. Penyebab Internal** 1. Terdapatnya Keterbatasan Anggaran dalam pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga lainnya Khususnya Gantungan Tas , Westafel, Kaca Rias Pegangan Tangan (Handle), dan tong sampah Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah **c. Penyebab Eksternal** 1. Pengalokasian Anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** 1. **Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**
	2. Indikator dan Target Kinerja 2. Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 4 unit
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp.70.000.000,-**

RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
		Masukan	Rp.3.000.000,-
		Keluaran	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya yaitu : Gantungan Tas, Westafel, Kaca Rias Pegangan Tangan (Handle) dan tong sampah
		Hasil	Terpenuhinya Fasilitas kantor yang Memadai
	Kegiatan 2		
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	

Painan, 02 Juli 2019

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUHANDRI, SE,MM

NIP. 19700608 200212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL, H. AGUS SALIM – PAINAN TELP (0756) 22161 FAX (0756) 22261

HASIL VERIFIKASI

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **BPBD Kabupaten Pesisir Selatan**

TAHUN ANGGARAN : **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020**

PROGRAM	**Program Kesiapsiagaan.**
KEGIATAN	**Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan.**
KODE Kegiatan	**1.19.1.19.05.23.18**
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat memiliki: ▪ Jumlah penduduk 513.183 jiwa , Tahun 2018 yaitu 260.112 Jiwa Laki-laki dan 253.071 Jiwa Perempuan. ▪ Luas daratan 2.297,30 km2 dan luas perairan laut ±18.500 km2, dengan panjang garis pantai 243..000 km, serta memiliki 275 buah pulau besar dan kecil. ▪ Memiliki 13 Kecamatan di pesisir pantai dan 2 kecamatan ditepi bukit ▪ Sumberdaya air yang melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 254 buah, bermuara di pantai barat dengan padang dan selatan dengan kepulauan mentawai . ▪ **Potensi bencana ada 13 yaitu:** ▪ Banjir ▪ Gempa bumi ▪ Gempa bumi dan tsunami ▪ Kebakaran permukiman ▪ Angin topan ▪ Banjir dan tanah longsor ▪ Tanah longsor ▪ Gelombang pantai dan abrasi ▪ Kebakaran hutan dan lahan ▪ Kecelakaan transportasi ▪ Konflik Sosial ▪ Kekeringan ▪ Kejadian luar biasa (KLB) ▪ Daerah rawan tsunami yaitu: Kecamatan IV Jurai, Bayang, IV Jurai Batang Kapas Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir Linggo

	Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.. **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** ***a. Faktor Kesenjangan*** **Akses:** Masih terbatasnya akses masyarakat bagi perempuan terhadap informasi kebencanaan baik melalui media cetak, elektronik maupun sosialisasi disebabkan penyebarluasan informasi yang masih terbatas. **Partisipasi:** Kurangnya partisipasi masyarakat perempuan dalam kegiatan penyebarluasan informasidan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab menghadapi bencana. **Kontrol:** ▪ Silabus dan Metode Pelatihan sudah baku sehingga peserta tidak ada ruang untuk menyampaikan aspirasinya. **Manfaat:** ▪ Masyarakat perempuan kurang memperoleh manfaat Hal ini disebabkan karena kurang mencukupinya penyediaan informasi tentang kebencanaan. ***b. Penyebab Internal*** ▪ Keterbatasan anggaran yang tersedia. ▪ Penyebarluasan informasi yang terbatas sehingga belum menjangkau semua masyarakat. ***c..Penyebab Eksternal*** ▪ Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.		
RENCANA TINDAK	**Kegiatan**	**Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan..**	
		Tujuan	Menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada perempuan –perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan.
		Aktivitas	1. Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam

			menghadapi bencana 3. Simulasi kebencanaan 4. Rapat-rapat kebencanaan dinagari/ kecamatan dalam peningkatan keisapsiagaan kelembagaan bencana di kecamatan.
		Sumber Daya (Input)	Dana: APBD
			Panitia: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
			Trainer: BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
			Peserta: Masyarakat dari Nagari di Kecamatan
			Sarana dan prasarana: transportasi, wireless dan infokus dari BPBD Kabupaten Pessel
		Output	▪ Terlatihnya 100 orang bagi perempuan Nagari.
ALOKASI SUMBER DAYA	***Anggaran***	Rp. 150.000.000,-	
	SDM	Panitia: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Peserta: Masyarakat dari Nagari/ Kecamatan.	
	Peralatan dan Mesin	Wireless dan infokus dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.	
Outcome	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebencanaan.. (%)		

Kepala Pelaksana,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ir. H. HERMAN BUDIARTO
Pembina Tk. I/NIP. 196701031992031010

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL, H. AGUS SALIM – PAINAN TELP (0756) 22161 FAX (0756) 22261

HASIL VERIFIKASI

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **BPBD Kabupaten Pesisir Selatan**

TAHUN ANGGARAN : **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020**

PROGRAM	**Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya dalam Pengurangan Risiko Bencana.**
KEGIATAN	**Pengembangan Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh**
KODE Kegiatan	**1.19.1.19.05.25.02**
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat memiliki: ▪ Jumlah penduduk 513.183 jiwa , Tahun 2018 yaitu 260.112 Jiwa Laki-laki dan 253.071 Jiwa Perempuan. ▪ Jumlah Nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari/Desa. ▪ Peta daerah rawan bencana ; Tsunami, Tanda warna Merah, Kuning dan Hijau, Banjir dengan Tanda warna Merah, kuning dan Hijau, Longsor dengan Tanda Warna Merah, Kuning dan Hijau, Angin Puting Beliung dengan Tanda Warna Merah, Kuning dan Hijau, Abrasi Pantai dengan Tanda Warna Merah, Kuning dan Hijau. ▪ Data kerentanan Tsunami 24.598 jiwa laki-laki dan 35.246 jiwa perempuan, Banjir 64.342 jiwa dan longsor 12.331 jiwa. ▪ Data korban sebelumnya Tsunami 0 Jiwa, Banjir 34 jiwa, Longsor 11 jiwa. (Data 3 Tahun Terakhir) ▪ Sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan bencana, perahu karet 12 unit (idealnya), masing-masing kecamatan ada posko SAR dan TRC sebanyak 15 Posko, dilengkapi alat komunikasi seluruh petugas Satgas SAR dan TRC di Kabupaten Pesisir Selatan ▪ Jumlah personil Satgas SAR 25 orang laki-laki dan 13 orang perempuan (minimalnya) dan Jumlah peserta kegiatan 20 orang laki-laki dan 2 perempuan (Data terakhir 2016)

	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender ***a. Faktor Kesenjangan*** **Akses:** - Minimnya akses informasi terhadap kelompok siaga bencana, - Lokasi pelatihan yang susah dijangkau. **Partisipasi:** Peran ganda perempuan. **Kontrol:** - Silabus dan Metode Pelatihan sudah baku sehingga peserta tidak ada ruang untuk menyampaikan aspirasinya. **Manfaat:** - Hasil pelatihan belum bisa dirasakan manfaatnya. ***b. Penyebab Internal*** ▪ Keterbatasan anggaran yang tersedia. ▪ Keterbatasan kewenangan BPBD. ▪ Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum responsive gender. ***c. Penyebab Eksternal*** - Stigma masyarakat bahwa perempuan harus dirumah. - Susah mendapatkan izin suami. - Peserta yang sudah dilatih belum bisa dipastikan akan selalu ada didaerah tersebut.		
RENCANA TINDAK	**Kegiatan**	**Pengembangan Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh.**	
		Tujuan	Mengurangi Risiko Bencana.
		Aktivitas	1.Memperbaiki jadwal pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanankan koordinasi. 3. Melaksanakan sosialisasi.
		Sumber Daya (Input)	Dana: APBD
			Panitia: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
			Trainer: BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

			Peserta: Masyarakat dari Nagari di Kecamatan
			Sarana dan prasarana: transportasi, wireless dan infokus dari BPBD Kabupaten Pessel
		Output	▪ Terlatihnya 90 orang KSB Nagari. ▪
ALOKASI SUMBER DAYA	***Anggaran***	Rp. 250.000.000,-	
	SDM	Panitia: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Peserta: Masyarakat dari Nagari/ Kecamatan.	
	Peralatan dan Mesin	Wireless dan infokus dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.	
Outcome	Menurunnya jumlah korban bencana. (%)		

Kepala Pelaksana,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ir.H. HERMAN BUDIARTO
Pembina Tk. I/ NIP. 196701031992031010

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan :	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin
2	Indikator kinerja kegiatan	Meningkatnya KUBE yang aktif Meningkatnya Pendapatan Anggota KUBE
3	Tujuan kegiatan	Mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
4	Kode Rekening Kegiatan	1.01.06.15.16
5	Analisa situasi	Data Terpilah Angka Keluarga Miskin 26.367 KK Miskin L : 19.572 P: 6.795 Jumlah Keluarga Miskin yang telah dibantu 200 KK (20 KUBE) L: 0 P: 200 Mayoritas anggota KUBE yang didominasi perempuan Kesenjangan Adanya Ketidaksetaraan Gender dibidang kesejahteraan sosial khususnya dalam hal pelayanan kepada KK Miskin laki-laki untuk mendapatkan bantuan KUBE **Akses:** Informasi laki-laki untuk mendapatkan bantuan KUBE masih rendah **Partisipasi :** Jumlah laki-laki masih relatif rendah dalam KUBE **Kontrol :** Semua pengambil keputusan lebih dominan perempuan (pencari nafkah utama) **Manfaat :** Manfaat dari KUBE lebih dominan dinikmati perempuan **Faktor Kesenjangan Internal dan Eksternal** **Sebab Kesenjangan Internal :** 1. Kurangnya pemahaman tentang PUG 2. Lemahnya komitmen untuk mendukung PUG 3. Belum ada produk hukum yang menjamin PUG **Sebab Kesenjangan Eksternal :** 1. Persyaratan memperoleh bantuan belum responsive gender

	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	Aktivitas 1 Menyusun Panduan KUBE yang responsive gender	**Tujuan** Sebagai pedoman bagi pengelola dalam rekrutmen peserta KUBE **Langkah kegiatan** 1. Membentuk Tim Penyusun panduan 2. Rapat Tim penyusun panduan 3. Menggandakan panduan KUBE
		Aktivitas 2 Sosialisasi PUG bagi pengelola KUBE	**Tujuan** Menyamakan persepsi dalam pengelolaan KUBE **Langkah kegiatan** 1. Membentuk panitia sosialisasi KUBE 2. Melaksanakan sosialisasi di lokasi KUBE di Nagari
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 93.991.480,-	
8	Dampak/hasil Output Kegiatan	1. Terjadinya peningkatan kesejahteraan anggota KUBE dengan meningkatkan pendapatan keluarga 2. Terjadinya persamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh bantuan bagi laki-laki dan perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

(HASIL VERIFIKASI)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan :	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin
2	Indikator kinerja kegiatan	Meningkatnya KUBE yang aktif Meningkatnya Pendapatan Anggota KUBE
3	Tujuan kegiatan	Mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
4	Kode Rekening Kegiatan	1.01.06.15.16
5	Analisa situasi	Data Terpilah Angka Keluarga Miskin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 (PSDA) Angka Keluarga Miskin 26.367 KK Miskin L : 19.572 P: 6.795 Jumlah Keluarga Miskin yang telah dibantu 200 KK (20 KUBE) 1 KUBE 10 KK L: 0 P: 200 Mayoritas anggota KUBE yang didominasi perempuan **Kesenjangan** **Akses:** - Adanya Ketidaksetaraan Gender dibidang kesejahteraan sosial khususnya dalam hal pelayanan kepada KK Miskin laki-laki untuk mendapatkan bantuan KUBE - Informasi Laki-laki untuk mendapatkan bantuan KUBE masih rendah. **Partisipasi :** Belum ada kepesertaan laki-laki dalam KUBE. **Kontrol :** Program Prioritas dari kementerian (Dana Dekon) lebih mengutamakan perempuan. **Manfaat :** KUBE lebih dominan dinikmati perempuan **Faktor Kesenjangan Internal dan Eksternal** **Sebab Kesenjangan Internal :** 1. Kurangnya pemahaman Pelaksana Kegiatan tentang PUG. 2. Lemahnya komitmen stakeholders untuk mendukung PUG **Sebab Kesenjangan Eksternal :** 2. Persyaratan memperoleh bantuan belum responsive gender

6	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	Aktivitas 1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KUBE	**Tujuan** Sebagai pedoman bagi pengelola dalam rekrutmen peserta KUBE Menyamakan persepsi dalam pengelolaan KUBE **Langkah kegiatan** 4. Membentuk Tim Penyusun panduan 5. Rapat Tim penyusun panduan 6. Menggandakan panduan KUBE 7. Membentuk panitia sosialisasi KUBE 8. Melaksanakan sosialisasi di lokasi KUBE di Nagari
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 93.991.480,-	
8	Dampak/hasil Output Kegiatan	1. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KUBE. 2. Terbinanya 20 KUBE Fakir Miskin	

Painan, 19 Juni 2019

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 007

Hasil Verifikasi

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Ilyas Yacub - Painan Telp. (0756-21800) Fax.0756-465208

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD	: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.PESSEL
T.A	: 2020
PROGAM	**Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
KEGIATAN	***Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender***
KODE REKENING	1.02.02.1.01.06.01.22.01.5.2
ANALISIS SITUASI	Evaluasi terhadap peraturan yang terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Pada tahun 2013 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) sebagai motor penggerak (driver) PPRG mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Adapun tujuan dari stranas tersebut agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis baik di tingkat nasional maupun daerah. Menyikapi hal tersebut sangat penting dilakukan penguatan kelembagaan PUG diantaranya peran Focal Point (perencana program) dalam melaksanakan PPRG di masing-masing SKPD.
	• **Data Pembuka Wawasan** Berdasarkan Surat Keputusan Bupati no : 460 /81/Kpts/BPT-PS / 2019 Tentang Pembentukan kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2019, Komponen perencana terdiri dari 30 SKPD dan 15 Kecamatan yang tergabung dalam Pokja PUG dan focal point Kab.Pessel dengan anggota Focal point 148 anggota dari seluruh OPD • Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/82/Kpts/BPT-PS/2019

Hasil Verifikasi

	tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencnaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan , anggota Tim Driver PPRG terdiri dari Bappedalitbang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat dan BPKD • Berdasarkan instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 179/Ins-2019 tentang Implementasi Gender Analysis Pathwy (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS) Dalam rencana Kerja anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ditetapkan secara bertahap 17 OPD yang membuat GAP dan GBS tahun 2020 • Jumlah nagari yang ada di Kab. Pessel sebanyak 182 nagari , yang sudah mendapatkan sosialisasi PUG sebanyak 23 Nagari
	1. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender ***Akses:*** • Akses untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahanan tentang PUG serta fungsi focal point dalam POKJA PUG melalui sosialisasi maupun media lainnya sangat kurang • Menganggap PUG hanyalah bentuk program yang hanya merupakan urusan perempuan saja sehingga kurang direspon oleh OPD dan masyarakat secara umum ***Partisipasi*** Masih kurangnya Partisipasi dan pemahaman pengambil kebijakan terhadap PUG. Masih adanya anggapan bahwa PUG hanya lah terkait urusan perempuan saja sehingga kurangnya kepedulian laki-laki sebagai pemangku kebijakan terhadap PUG ***Kontrol*** Dalam menentukan kepesertaan dalam pelatihan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan ***Manfaat*** Para pemangku kebijakan serta perencana program (focal point) di SKPD belum mendapatkan manfaatnya dari program dan kegiatan yang responsif gender **Penyebab Internal** ▪Semua anggota focal point dan perencana program di SKPD belum memahami, dan mendapatkan pembekalan ilmu tentang PPRG ▪ Sering terjadi rotasi dan mutasi SDM sebagai anggota focal point pada SKPD ▪Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang PUG dan PPRG dikarenakan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan

Hasil Verifikasi

	Penyebab Eksternal ▪ Koordinasi dan integrasi antar lintas SKPD dalam melaksanakan PPRG masih lemah. ▪ Belum sinerginya anggota TAPD dalam memahami PPRG ▪ Belum seluruh elemen masyarakat disosialisasikan PUG ▪ Belum seluruh data gender yang dibutuhkan tersedia di SKPD dan stake holder.		
RENCANA TINDAK	Kegiatan	***Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender***	
		Tujuan	Meningkatkan kompetensi para perencana yang tergabung pada focal pooint dalam menerapkan PPRG di masing-masing SKPD
		Aktifitas 1	Advokasi dan sosialisasi regulasi yang dapat dijadikan pedoman dasar penerapan PPRG di daerah (peraturan perundangan pusat maupun derah) Tujuan : Memastikan agar para penentu kebijakan dan stakeholder dan memahami dan komit.
		Aktifitas 2	Pelatihan PPRG bagi semua anggota Focal Point SKPD Tujuan : Memasrtikan seluruh focal point memahami dan mampu melaksanakan penyusunan PPRG
		Aktifitas 3	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan PPRG di masing-masing SKPD • Koordinasi dengan semua lintas pelaksana pembangunan tentang pelaksanaan PPRG
		Sumber Daya/ Input	a. 3 orang Nara Sumber (3 orang paraktisi/akademisi) b. Modul PPRG c. Anggota Focal Point d. Program dan kegiatan yang akan dianalisis
		Out Put	1. 90 orang anggota Focal Point yang sudah Paham tentang integrasi

Hasil Verifikasi

			Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Penguatan kelembagaan PUG terutama Focal Point dalam melaksanakan PPRG 3. Lahirnya program dan kegiatan yang responsif gender di Kabupaten Pesisir Selatan
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	**Rp. 114,807,880**	
	SDM	3 orang nara sumber Jumlah peserta pelatihan PPRG 90 orang yang terdiri dari anggota Focal Point SKPD Jumlah Peserta sosialisasi PUG dari Nagari 182 Nagari	
DAMPAK/HASIL/ MANFAAT	1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi para perencana program yang tergabung dalam Focal Point dalam merealisir dan mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Tersusunya anggran Responsif Gender di masing-masing SKPD dengan melampirkan GAP dan GBS		

Painan, 19 Juni 2019

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 007

GBS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program Kegiatan	• Pembangunan Jembatan Rangka • Pembangunan Jembatan Rangka Binjai (Lanjutan)	
2	Output Kegiatan	1. Terlaksananya pembangunan jembatan rangka 2. Tersedianya jembatan rangka yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum 3. Mudahnya akses penyeberangan masyarakat menggunakan jembatan rangka	
3	Analisa Situasi	Panjang Jembatan Rangka Binjai (Lanjutan) sepanjang 50 meter Di Nagari tersebut hanya terdapat 1 unit jembatan rangka yang tidak layak pakai Faktor Kesenjangan : **AKSES,**Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses perekonomian masyarakat setempat **PARTISIPASI,**Hasil musrenbang kabupaten belum memprioritaskan penggantian jembatan rangka yang baru **KONTROL,**Tidak sesuainya beban kendaraan yang lewat dengan tonase jembatan rangka yang ada **MANFAAT,** Belum optimalnya pemakaian jembatan Rangka Binjai oleh Masyarakat Faktor internal dan Eksternal : Belum menjadi kegiatan prioritas anggaran Adanya pandangan bahwa proses pembangunan dapat dilakukan secara umum tanpa memperhatikan aspek **akses,** partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat.	
4	Rencana Aksi	Kegiatan 1	• Melakukan Survey Lapangan
		Kegiatan 2	• Merencanakan pembangunan jembatan rangka yang ramah dan aman untuk wanita, anak-an lansia dan penyandang disabilitas.
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Tahun 2020	Jumlah Anggaran Rp. 10.100.000.000

	Dampak / Hasil Output Kegiatan	Output : • Terlaksananya Pembangunan Jembatan Rangka Binjai yang responsive gender Outcome : • TersedianyaPembangunan Jembatan Rangka Binjai sepanjang 50 meter

Painan, 19 Juni 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ru
Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003

GBS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program Kegiatan	• Peningkatan Jalan Kabupaten • Peningkatan Jalan Koto Baru – Limau Manis	
2	Output Kegiatan	1. Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten 2. Tersedianya jalan kabupaten yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum 3. Mudahnya akses masyarakat menuju ke lokasi tersebut	
3	Analisa Situasi	Panjang Jalan Koto Baru – Limau Manis 7,1 Km Kondisi Jalan Koto Baru – Limau Manis yang rusak 5,2 Km Faktor Kesenjangan : **AKSES,**Jalan Koto Baru – Limau Manis yang masih rusak memberikan rasa tidak nyaman terhadap pengguna **jalan** **PARTISIPASI,**Hasil musrenbang kabupaten belum memprioritaskan perbaikan Jalan Koto Baru – Limau Manis**KONTROL,** • Kurang pedulinya masyarakat terhadap kondisi jalan yang ada • Tidak sesuainya beban kendaraan yang lewat dengan tonase jalan yang ada **MANFAAT,** Belum optimalnya pemakaian jalan Koto Baru – Limau Manis oleh Masyarakat Faktor internal dan Eksternal : Belum menjadi kegiatan prioritas anggaran Adanya pandangan bahwa proses pembangunan dapat dilakukan secara umum tanpa memperhatikan aspek **akses** partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat.	
4	Rencana Aksi	Kegiatan 1	Melakukan Survey Lapangan
		Kegiatan 2	Merencanakan pembangunan jalan yang ramah dan aman untuk wanita, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Tahun 2020	Jumlah Anggaran Rp. 10.400.000.000

Dampak / Hasil Output Kegiatan	Output : • Terlaksananya Peningkatan Jalan Koto Baru – Limau Manis Outcome : • Tersedianya peningkatan Jalan Koto Baru – Limau Manis sepanjang 5,2 Km • Meningkatnya peran serta anggota kelompok perempuan dalam kegiatan peningkatan jalan

Painan, 19 Juni 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Gender Budget Statement
(Pernyatan Anggaran Gender)

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN KAB.PESSEL

Bidang : KESGA & GIZI

Program	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	
Kegiatan	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak	
Indikator Kinerja Kegiatan	Menurunnya Angka Kematian ibu maternal dan bayi serta anak balita melalui peningkatan upaya kesehatan ibu dan anak	
Output Kegiatan	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petugas dalam pelaksanaan kegiatan program KIA	
Analisa Situasi	AKI tahun 2018 : 92,27 / 100.000 KH (8 org) AKB tahun 2018 : 10.84 / 1000 KH (94 org) Jumlah Kelahiran Hidup 8670 org Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 : 67/100.000 KH (6 Org), Tahun 2017 89/100.000 KH (5 Org),Tahun 2018: 92,3/100.000 KH (6 Org). Angka kematian Bayi (AKB) tahun 2016 : 5/1000 KH (48 jiwa), Tahun 2017 : 6/1000 KH (42 jiwa,Tahun 2016 Sebanyak 48 jiwa	
Rencana Aksi	Komponen 1	Melaksanakan Monev Program KIA ke Puskesmas
	Komponen 2	Melaksanakan pertemuan lintas program dan tatalaksana bumil anemia
	Komponen 3	Melaksanakan audit Maternal dan Perinatal
	Komponen 4	Melaksanakan Review Program Kelas Ibu Hamil dan Balita
	Komponen 5	Melaksanakan Review Kohor,P4K,MTBM/Mtbs di Puskesmas.
Alokasi anggaran Output Kegiatan	Rp. 500.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650331 199803 1 002

Gender Budget Statement
(Pernyatan Anggaran Gender)

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN KAB.PESSEL TAHUN ANGGARAN 2019
Bidang : P2M

Program	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
Kegiatan	Peningkatan Imunisasi	
Indikator Kinerja Kegiatan	Menurunnya prevalensi penyakit menular pada masyarakat dikabupaten pesisir selatan.	
Output Kegiatan	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan imunisasi	
Analisa Situasi	Jumlah bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2018 (IDL) 8.042 bayi jumlah ibu hamil yang mendapat imunisasi TD1 2.250 orang (20%), imunisasi TD2 2.003 orang (17,8%), imunisasi TD3 1.037 orang (9,2%), imunisasi TD4 769 orang (6,8%), imunisasi TD5 721 orang (6,4%),	
Rencana Aksi	Komponen 1	Melaksanakan pelayanan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi
	Komponen 2	Melaksanakan pelayanan imunisasi TT pada ibu hamil
	Komponen 3	Melaksanakan pelayanan imunisasi TT pada wanita usia subur (WUS)
Alokasi anggaran Output Kegiatan	Rp.200.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Menurunnya prevalensi penyakit menular pada masyarakat dikabupaten pesisir selatan.	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP 19650831 199803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax (0756) 21293
dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan**

TAHUN ANGGARAN : **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020**

PROGRAM	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana**
KEGIATAN	**Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)**
KODE Kegiatan	**1.02.08.1.02.07.01.27.07**
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat memiliki: ▪ Data Jumlah penduduk pesisir selatan :Tahun 2018 yaitu 264.084 (jiwa).laki-laki dan 255.952 (Jiwa)perempuan. ▪ Jumlah Nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari/Desa. ▪ Jumlah Pasangan Usia Subur Di Kabupaten Pesisir selatan tahun 2018 sebanyak 78,673 % ▪ Komunikasi kesehatan adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif dimasyarakat, dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan komunikasi pribadi maupun komunikasi massa. ▪ Informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masy (pesan yang disampaikan) ▪ Edukasi adalah proses perubahan perilaku ke arah yang positif. Pendidikan kesehatan merupakan kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan karena merupakan salah satu peranan yang harus dilaksanakan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan

	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender ***a. Faktor Kesenjangan*** **Akses:** . Kurangnya media komunikasi, informasi dan Edukasi tentang program Keluarga Berencana bagi Masyarakat . Masih Kurangnya Informasi Tentang Pemakaian Kontrasepsi **Partisipasi:** . Masih rendahnya kepedulian Masyarakat terhadap informasi Keluarga Berencana **Kontrol:** - Masih kurangnya Media komunikasi. **Manfaat:** Media belum mampu memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat tentang Program KB ***b. Penyebab Internal*** ▪ Media KIE Bias Gender ***c. Penyebab Eksternal*** . Stigma masyrakat bahwa yang memakai konrasepsi itu perempuan . Kurangnya kesadaran lelaki untuk menggunakan kontrasepsi		
RENCANA TINDAK	**Kegiatan**	**Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)**	
		Tujuan	**Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Kontrasepsi Jangka Pendek**
		Aktivitas	1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang melalui media KIE 2. Meningkatkan Peran Aktif dari TNI untuk mencari aseptor KB untuk metode Kontrasepsi jangka panjang. 3. Meningkatkan Peran Aktif Penyuluh KB. 4. Meningkatkan peran aktif dari lembaga lembaga KB
		Sumber	Dana: APBN

		Daya (Input)	Media KIE KB
			Kader KB
			Kelembagaan KB
			Sarana dan prasarana: Media informasi outdor dan indor
		Output	▪ Meningkatnya Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Jangka Pendek.
ALOKASI SUMBER DAYA	***Anggaran***	Rp. 195.579.720	
	SDM	Penyuluh KB, Kader KB dan Lembaga KB	
	Peralatan dan Mesin	Obat obatan untuk pelayanan MKJP dan Non MKJP. Media spanduk, plamlet outdor dan indor	
Outcome	Jumlah Aseptor Pelayanan MKJ Panjang sebanyal 150 Orang dan MKJ Pendek		

Kepala Pelaksana,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

HAMDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax (0756) 21293
dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan**

TAHUN ANGGARAN : **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020**

PROGRAM	**Program Peningkatan Program Pelayanan Keluarga Berencana**
KEGIATAN	**Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bayangkara/PKK dan Jambore**
KODE Kegiatan	**1.02.07.01.31.01**
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat memiliki: ▪ Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka tahun 2018 berjumlah 501.197 jiwa , Tahun 2017 yaitu 247.449 Jiwa Laki-laki dan 253.748 Jiwa Perempuan. ▪ Jumlah Nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari/Desa. ▪ Jumlah Pasangan Usia Subur Di Kabupaten Pesisir selatan tahun 2018 sebanyak 78,673 % ▪ Jumlah Aseptor KB yang Menggunakan Aseptor KB: 18,83 % (2.475 MKJP dan 13.140 Aseptor **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** ***a. Faktor Kesenjangan*** **Akses:** - Sedikitnya Rasio Penggunaan Kontrasepsi KB yang Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOW, Implant dan MOP) - Masih Kurangnya Informasi Tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang - Memotifasi Masyarakat untuk menggunakan metode MKJP dengan pemberian Dana Stimulan **Partisipasi:** . Kurang Peran Aktif Masyarakat dalam Menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang

	Kontrol: - Banyaknya PUS yang telah Mempunyai Anak lebih dari dua orang tidak mendapat persetujuan dari pasangan. **Manfaat:** - Kurangnya Pelayanan KB dengan Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. ***b. Penyebab Internal*** ▪ Kurangnya Tenaga Penyuluh KB dalam Menfasilitasi Pengguna KB Jangka Panjang ***c. Penyebab Eksternal*** - Stigma masyarakat bahwa yang memakai kontrasepsi itu Perempuan - Kurangnya kesadaran lelaki untuk menggunakan kontrasepsi. - Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang kontrasepsi janghka Panjang - Adanya beberapa kejadian Komplikasi penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang membuat masyarakat takut menggunakan kontrasepsi jangka panjang		
RENCANA TINDAK	**Kegiatan**	**Bakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bhayangkara/PKK dan Jambore**	
		Tujuan	**Meningkatkan Pemakaian Konrasepsi Jangka Panjang** (IUD, IMPLANT, MOW, MOP)
		Aktivitas	1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjan 2. Meningkatkan Peran Aktif dari TNI untuk mencari aseptor KB untuk metode Kontrasepsi jangka panjang. 3. Meningkatkan Peran Aktif Penyuluh KB.
		Sumber Daya (Input)	Dana: APBD
			Penyuluh KB
			Kader KB
			Kelembagaan KB
			Sarana dan prasarana: transportasi, untuk pelayanan yaitu Mobil pengangkut aseptor KB Kabupaten Pessel
		Output	▪ Meningkatnya Pelayanan Metode Kontrasepsi

		Jangka Panjang.
ALOKASI SUMBER DAYA	***Anggaran***	Rp. 244.550.000
	SDM	Penyuluh KB dan Kodim 0311 Pessel
	Peralatan dan Mesin	Obat obatan untuk pelayanan MKJP.
Outcome	Jumlah Aseptor Pelayanan MKJP sebanyal 150 Orang	

Kepala DPMDPPKB,

HAMDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005

FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan :	**Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** Pemberdayaan Kelembagaan Dan Usaha Peternakan	
2	Indikator kinerja kegiatan	Jumlah petani yang mendapat pelatihan kelembagaan dan usaha peternakan	
3	Tujuan kegiatan	Meningkatkan sumber daya peternakan terutama dalam managemen agribisnis, permodalan dan pengembangan usaha	
4	Kode Rekening Kegiatan	2.00.03.2.00.03.02.22.18.	
5	Analisa situasi	Jumlah penduduk Pesisir Selatan, laki-laki 226.83, perempuan 230.502 - Jumlah penduduk pesisir, yg bekerja disektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 85.368 orang - Rumah tangga peternak tahun 2018 : Sapi 35.952 RTP Kerbau 2.900 RTP Kambing 6.492 RTP Ayam lokal 52.663 RTP Ayam potong 184 Ayam ras petelur 30 RTP Itik 5.037 RTP Kelompok Tani Ternak 350 Kelompok - SDM peternak masih terbatas baik dari segi kualitas maupun pengalaman Faktor Kesenjangan **Akses :** -Sebagian besar wanita pesisir adalah ibu rumah tangga, **Partisipasi :** -Peran perempuan dalam membantu perekonomian cukup tinggi dan berperan ganda sebagai pemelihara ternak **Kontrol :** - Biasanya yang dilibatkan dalam pelatihan adalah kaum bapak bapak **Manfaat :** - Kaum ibu bisa membantu kepala keluarga dirumah melalui pengembangan usaha peternakan mulai dari pemeliharaan rutin sampai pengolahan hasil peternakan	
6	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	- Kegiatan 1	- Pelatihan managemen agribisnis Tujuan adanya data terpilah keterlibatan perempuan dalam managemen agribisnis

			Tujuan : supaya petani ternak yang berusaha dibidang usaha potong bisa mengelola usaha sesuai dengan tata kelola usaha yang baik
		Kegiatan 3	- sosialisasi program AUTS dan KUR Peternakan Tujuan : memberi pemahaman kepada tentang perlindungan bagi petani ternak dalam pemeliharaan ternak dan kemudahan dalam peengembangan modal usaha
		Kegiatan 4	- Bintek Kelembagaan dan Usaha peternakan Tujuan : memberi bimbingan dan pembinaan bagi petani ternak dalam pengembangan usaha kelompok tani ternak
7	Alokasi Anggaran		Rp. 150.000.000,00
8	Dampak/hasil Output Kegiatan (copy kol 8)		Output .... 1. Terlaksananya pengembangan agribisnis usaha peternakan melalui peningkatan SDM peternakan sebanyak 40 orang peternak sapi dan unggas 2. Terlaksananya usaha kemitraan ayam ras pedaging sebanyak 30 orang peternak ayam ras pedaging 3. Terfasilitasinya pengembangan modal usaha ternak masyarakat melalui perbankan sebanyak 20 orang 4. Terealisasinya asuransi ternak untuk 20 orang petani ternak 5. Terlaksananya pengembangan kelembagaan dan usaha peternakan kelompok tani ternak sebanyak 40 orang anggota kelompok tani ternak

FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan :	**Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan** Promosi atas produksi hasil peternakan unggulan daerah	
2	Indikator kinerja kegiatan	Jumlah even promosi yang diikuti	
3	Tujuan kegiatan	Dikenalnya produk hasil peternakan dari kabupaten Pesisir Selatan oleh masyarakat luas	
4	Kode Rekening Kegiatan	2.00.03.2.00.03.02.23.07.	
5	Analisa situasi	- Pesisir Selatan merupakan daerah penghasil sapi potong terbesar di Sumatera Barat. Populasi sapi tahun 2018 sekitar 86.040 ekor -Rumah tangga pemelihara ternak tahun 2018 Sapi 35.952 RTP Kerbau 2.900 RTP Kambing 6.492 RTP Ayam lokal 52.663 RTP Ayam potong 184 Ayam ras petelur 30 RTP Itik 5.037 RTP - Usaha pasca panen yang ada baru berupa usaha rumah tangga dengan kapasitas kecil berupa usaha dendeng, rendang, telur asin dan karupuak jangek -Belum ada unit usaha yang tergabung dalam kelompok usaha, sehingga pengembangan modal tergantung pada usaha pribadi Faktor Kesenjangan **Akses :** Untuk pemasaran ternak dan hasil ternak, kondisi pasar masih belum kondusif untuk perempuan, termasuk transportasi dan kondisi lapangan **Partisipasi :** Sebagian besar pelaku pasar adalah laki-laki **Kontrol :** Biasanya laki-laki lebih dominan dalam acara promosi dan pemasaran hasil peternakan dan produk hasil peternakan **Manfaat :** Perempuan dan laki-laki berperan aktif dalam promosi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil produk peternakan	
6	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	- Kegiatan 1	Mengikuti even promosi tingkat daerah , propinsi maupun nasional dengan melibatkan usaha rumah tangga pengolah hasil peternakan Tujuan : Dikenalnya produk hasil peternakan dari kabupaten Pesisir Selatan oleh masyarakat luas

		Kegiatan 2 :	Operasi Pasar Komoditi Peternakan Tujuan : Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan produk peternakan dengan harga yang terjangkau
		Kegiatan 3 :	Pendataan Unit Pengolah Produk hasil peternakan Tujuan : Terdatanya unit pengolah produk hasil peternakan
7	Alokasi Anggaran		Rp. 350.000.000,00
8	Dampak/hasil Output Kegiatan (copy kol8)		Output .... 1. Terlaksana dan diikutinya 3 even promosi hasil peternakan yakni : - Festival Langkisau - Livestock expo dan bulan bakti peternakan - Sumbar Expo - APKASI 2. Terlaksananya Operasi Pasar Komoditi Peternakan (Daging,Ayam Potong dan Telur) 3. Terlaksananya pendataan kembali unit usaha pengolahan hasil peternakan

Kepala Dinas

Drh. Hj. HAZRITA, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19590613 198603 2 001

FORM KAK/TOR

Program		**PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN**
Sasaran Program		Petani ternak
Kegiatan		Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Peternakan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dantelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Pasal 7 ayat (1) setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
	Gambaran Umum	Dari jumlah penduduk kabupaten agam 519.756 jiwa yang sudah memiliki akta kelahiran baru 232.579 dan yang belum memilik akta kelahiran masih ada sebanyak..... Terdiri dari laki..... dan perempuan.....

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	**Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi**		
KODE PROGRAM	**1.02. 11. 1.02.11.01.18**		
KEGIATAN	**Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Jumlah koperasi aktif = 115 unit - Jumlah Pengurus Koperasi laki-laki = 70% - Jumlah Pengurus Koperasi perempuan = 30%		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **Akses :** 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam manajemen koperasi. 2. Dominasi laki-laki dalam kepengurusan koperasi dibandingkan perempuan. **Partisipasi :** 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. **Kontrol :** Penilaian kinerja koperasi belum berbasis gender. **Manfaat:** Pengurus koperasi belum menyadari sepenuhnya manfaat dari kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi yang sudah dilaksanakan. **b. Penyebab Internal** 1. Keterbatasan SDM tenaga teknis bidang koperasi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi. 2. Kurang sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi. 3. Kurangnya informasi dalam pengarustamaan gender di lingkugan koperasi. **c. Penyebab Eksternal** 1. Masih rendahnya pemahaman Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian. 2. Masih kuatnya budaya bahwa laki-lakiadalah pemimpin bagi wanita. 3. Kurangnya pemahaman terhadap konsep gender.		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** • Melakukan penilaian kinerja koperasi yang berbasis gender • Meningkatkan kualitas kelembagaan dan suaha koperasi yang memperhatikan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di koperasi. • Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menjadi Pengurus Koperasi.		
	2. Indikator dan Target Kinerja 1. Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Pengurus Koperasi yang laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah kriteria penilaian kinerja koperasi yang melihat kepada aspek gender mulai dari keanggotaan koperasi, pengurus, manajer dan Pengawas.		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 385.562.900,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	
		Masukan	Rp.. 385.562.900,-
		Keluaran	- Terbinanya 15 koperasi aktif.
		Hasil	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang responsive gender

Painan, 2 Juni 2019

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	**PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH**		
KODE PROGRAM	**1.02. 11. 1.02.11.01.18**		
KEGIATAN	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Jumlah UMKM Pesisir Selatan = 6,968 orangt - Jumlah pelaku UMKM laki-laki = 3.416 Orang - Jumlah pelaku UMKM perempuan = 3.474 orang		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **Akses :** - Sebagian besar pelaku UMKM masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan kewirausahaan . **Partisipasi :** - Perempuan lebih tekun dan serius dalam mengikuti pelatihan - Pelaku UMKM Laki-laki kurang berminat mengikuti pelatihan kewirausahaan **Kontrol :** Perlunya pemahaman kepada pelaku UMKM terhadap pentingnya pengetahuan tentang teknik-teknik berwirausaha **- Manfaat:** Belum Terciptanya SDM yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha agar dapat membanggun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula serta mengembangkan Home Industri. **b. Penyebab Internal** - Keterbatasan SDM Bidang Koperasi dan UMKM dalam memberikan pembinaan terhadap UMKM - Pelaku UMKM yang dibina tersebar dan daerahnya luas memanjang dari utara ke selatan **c. Penyebab Eksternal** - Lambatnya pengembangan usaha UMKM karena keterbatasan SDM dan modal usaha - Kurangnya inovasi dari UMKM dalam pengembangan produk sehingga kurang diminati oleh masyarakat yang berdampak pada tidak berkembangnya usaha. - sebahagian UMKM engan mengikuti pelatihan karena tidak mendatangkan manfaat secara langsung.		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** • Melakukan pelatihan kewirausahaan yang berbasis gender • Meningkatkan omset pelaku UMKM yang memperhatikan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan usaha. • Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menjadi mengikuti pelathan kewirausahaan.		
	2. Indikator dan Target Kinerja 1. Jumlah pelaku UMKM (laki laki dn Perempuan) yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	
		Masukan	Rp.. 600.000.000,-
		Keluaran	- Terlatihnya 200 orang pelaku UMKM
		Hasil	terciptannya kualitas SDM pelaku UMKM dengan semangat kewirausahaan yang tinggi

Painan, 20 Juni 2019

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN**		
KODE PROGRAM	**1.02.1.02.06.01.02**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan c. Belum ada ruang tunggu yang nyaman untuk masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan d. Masih minimnya fasilitas umum pelayanan seperti belum adanya ruang/taman bermain anak, bagi masyarakat yang membawa anak dan ruang ibu menyusui e. Belum tersedianya loket pelayanan khusus disabilitas, orang tua dan ibu hamil		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. **Faktor Kesenjangan** ➢ Masyarakat merasa tidak nyaman dalam mengurus dokumen kependudukan karena kurangnya fasilitas pelayanan untuk mereka. ➢ Masyarakat engan dalam kepengurusan adminduk karena minimnya fasilitas pelayanan. ➢ Dukumen perencanaan dalam peningkatan pelayanan telah ada tapi belum maksimal dilaksanakan ➢ Menurunnya IKM Pelayanan Adminduk karena kurangnya fasilitas pelayanan. b. **Penyebab Internal** ➢ *Belum tertatanya ruang ruang gedung yang ada. Untuk menunjang pelayanan Adminduk* c. **Penyebab Eksternal** ➢ Masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan karena ruang pelayanan yang tidak responsive gender		
CAPAIAN PROGRAM	**3. Tolak Ukur** a. Memberikan ruangan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Menyediakan ruang bermain bagi anak-anak yang ikut saat orang tuanya mengurus Dokumen Kependudukan dan ruang ibu menyusui ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	4. Indikator dan Target Kinerja a. Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan b. Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp 390.812..000,00**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**		
		Masukan	Rp 150.000.000,-
		Keluaran	Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan.
		Hasil	Terciptanya ruang pelayanan yang representative(75%)
	Kegiatan 2		
		Masukan	200.000.000,-
		Keluaran	1. Tersedianya 16 set perlengkapan bermain anak) 2. 16 unit kursi roda 3. 16 set perlengkapan untuk ibu menyusui 4. 16 set perlengkapan disabilitas
		Hasil	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum(80%)

Painan, 21 Juni 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si
Nip. 19670712 199202 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		
KODE PROGRAM	**1.02.06.1.02.06.01.15.17**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Jumlah ASN Dukcapil tahun Tahun 2019 bertambah menjadi 137 orang, yang mana pada tahun 2017 berjumlah 47 orang dan tahun 2018 berjumlah 128 orang. c. Dibentuk Unit Kerja Layanan (UKL) Disdukcapil di 15 Kecamatan.		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** ➢ Operator dan Register Pegawai di UKL belum mahir menggunakan aplikasi SIAK ➢ Operator dan Register membutuhkan waktu yang cukup untuk memahami aplikasi SIAK. ➢ Operator dan register membutuhkan buku panduan aplikasi SIAK yang mudah untuk dipahami ➢ Lambatnya layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. **b. Penyebab Internal** ➢ Operator dan Register UKL Disdukcapil di 15 Kecamatan berasal dari Pegawai UPTD Dinas Pendidikan. ➢ Keterbatasan kualitas kapasitas SDM Pelayanan Kependuduan **c. Penyebab Eksternal** ➢ Masyarakat yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda ➢ Masyarakat selalu ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan walaupun persyaratan mereka kurang		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** ➢ Agar semua aparatur Kependudukan bisa melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik ➢ Dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh masyarakat.		
	2. Indikator dan Target Kinerja Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan : 75 orang		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp 6.746.242.914,00**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**		
		Masukan	Rp. 150.000.000,-
		Keluaran	75 Peserta Sosialisasi Administrasi Kependudukan
		Hasil	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar 80%

Painan, 21 Juni 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M. Si
Nip. 19670712 199202 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	**Program Pendidikan Kedinasan**		
KODE PROGRAM	**3.00.04.29**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana diklat PIM Tk. III merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon III. - Diklat Pim Tk. III ini harus di ikuti oleh PNS yang menduduki jabatan eselon III maksimal 6 (enam) bulan setelah menjabat. - Jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon III saat ini sebanyak 159 orang terdiri dari 122 orang laki-laki dan 37 orang perempuan. Dan yang telah mengikuti diklat PIM tk. III sebanyak 26 orang, terdiri dari 19 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Jadi eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III sebanyak 133 orang terdiri dari 103 orang laki-laki dan 30 orang perempuan		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk.III sehingga banyak PNS yang menduduki jabatan eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III **b. Penyebab Internal** Keterbatasan anggaran. **c. Penyebab Eksternal** - Karena keterbatasan anggaran, sehingga BKPSDM tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM Tk. III sehingga pelaksanaan Kegiatan Diklat PIM Tk. III ini mengikuti pola kontribusi ke BPSDM Prov. Sumatera Barat - Dengan pola kontribusi ini membuat BKPSDM harus mengantri untuk memenuhi kuota peserta ke BPSDM Prov. Sumbar - Pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat PIM Tk. III terbatas		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur**		
	2. Indikator dan Target Kinerja		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 250.000.000,-**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	
		Masukan	Rp. 250.000.000,-
		Keluaran	Terkirimnya 8 orang untuk Diklat Pim III
		Hasil	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur

Painan, 2 Juli 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KAB. PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

AHDA YANUAR, S.Kom
Nip. 19670101 199003 1 013

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	**Program Pendidikan Kedinasan**		
KODE PROGRAM	3.00.04.29		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana diklat PIM Tk. IV merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon IV. - Diklat Pim Tk. IV ini harus di ikuti oleh PNS yang menduduki jabatan eselon IV maksimal 6 (enam) bulan setelah menjabat. - Jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon IV saat ini sebanyak 468 orang terdiri dari 261 orang laki-laki dan 207 orang perempuan, dan yang telah mengikuti diklat PIM tk. IV sebanyak 156 orang, terdiri dari 88 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. Jadi eselon IV yang belum mengikuti diklat PIM Tk. IV sebanyak 312 orang, terdiri dari 173 orang laki-laki dan 139 orang perempuan. -		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk.IV sehingga banyak PNS yang menduduki jabatan eselon IV yang belum mengikuti diklat PIM Tk. IV **b. Penyebab Internal** Keterbatasan kebijakan anggaran. **c. Penyebab Eksternal** Karena keterbatasan kebijakan anggaran, sehingga BKPSDM tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM Tk. IV sehingga pelaksanaan Kegiatan Diklat PIM Tk. IV ini mengikuti pola fasilitasi. Pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat PIM tk. IV terbatas.		
CAPAIAN PROGRAM	**3. Tolak Ukur**		
	4. Indikator dan Target Kinerja		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 467.987.000,-**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV	
		Masukan	Rp. 467.987.000,-
		Keluaran	30 orang pejabat eselon IV mengikuti Diklat PIM Tk. IV Tahun 2020
		Hasil	Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur

Painan, 2 Juli 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KAB. PESISIR SELATAN

AHDA YANUAR, S.Kom
Nip. 19670101 199003 1 013

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**		
KODE PROGRAM	**2.00.02.1.02.13.01.15**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada ± 120 orang - Jumlah Kunjungan Wisata pada 2 Tahun terakhir tahun 2017 sebanyak 2.350.000 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 2.479.841 wisatawan - Jumlah Destinasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 16 destinasi		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **Akses :** - Lokasi berada di Kec.IV Jurai jadi Kec Lain yang ingin ikut harus menempuk jarak yang jauh - Keterbatasan informasi kegiatan Festival langkisau terhadap pelaku wisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif **Partisipasi:** - Pelaku usaha yang berpartisipasi masih sedikit - Belum semua pelaku usaha mampu dan siap dalam mempromosikan produk - Pelaku usaha yang ikut serta secara mandiri di dominasi oleh pelaku usaha skala besar - Peserta Festival Langkisau belum mampu mengelola stand dengan optimal **Kontrol:** - Penentuan pelaku usaha ditentukan oleh pemerintah daerah **Manfaat:** - Tidak semua pelaku home industri siap dalam kualitas dan kuantitas produk yang di minta calon buyer. - Manfaat langsung terkait dengan pelaksanaan Festival Langkisau belum bisa di rasakan olek pelaku wisata dan Ekonomi kreatif **b. Penyebab Internal** - Keterbatasan kewenagan OPD terkait dalam menentukan lokasi festival yang ideal. - Pengelola kegiatan belum memanfaatkan media informasi secara optimal. - Belum dilakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh **c. Penyebab Eksternal** - Kelayakan Lokasi dalam menampung peserta dan pengunjung Festival belum terpenuhi - Keterbatasan angaran pelaku usaha untuk menyewa stand - Keterbatasan kemampuan SDM peserta Festival Langkisau dalam mempromosikan produk		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Meningkatknya penyebaran informasi promosi dan iklim invetasi serta daya saing produksi Kabupaten Pesisir Selatan		
	2. Indikator dan Target Kinerja 100%		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp 1.500.000.000**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Festival Langkisau	
		Masukan	Rp **450.000.000**
		Keluaran	Terlaksananya Festival Langkisau 2020
		Hasil	Meningkatnya kunjungan wisata sekitar 10 (%)
	Kegiatan 2		
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	
	Kegiatan 3		
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	

Painan, Juni 2019

Kepala OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		
KODE PROGRAM	2.00.02.1.02.13.01.15		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada ±120 orang - Jumlah Kunjungan Wisata pada 2 Tahun terakhir tahun 2017 sebanyak 2.350.000 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 2.479.841 wisatawan - Jumlah Destinasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 16 destinasi - Jumlah peserta Uda Uni yang mengikuti seleksi setiap tahun ± 100 orang - Jumlah peserta Uda Uni yang telah mengikuti setiap tahun 60 orang		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1). Akses : • Minimnya sosialisasi sehingga menyebabkan sedikitnya peserta • Keikutsertaan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar memprsulit mereka dalam hal pembiayaan dan waktu karena seleksi diadakan di Kabupaten 2). Partisipasi • Belum banyak peminat untuk ikut serta dalam Pemilihan Uda Uni karena Sosialisasi yang kurang • Keterbatasan dalam hal pengetahuan tentang pariwisata . 3). Kontrol : • Masih kurangya referensi pemuda- pemudi dalam pariwisata khususnya Kab. Pesisir Selatan 4). Manfaat : • Rasa ingin bersaing masih kurang • Penerapan ilmu yang dimiliki oleh peserta belum maksimal karena fasilitas komunikasi masih lemah **b. Penyebab Internal** – Belum maksimal koordinasi dengan instansi terkait – Belum adanya kebijakan Pemerintah paska uda uni terpilih **c. Penyebab Eksternal** – Kurangnya minat pemuda pemudi untuk mengikuti ajang pemilihan uda uni – Belum semua Pemuda-pemudi yang paham tentang pariwisata		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Memberikan kesempatan kepada generasi muda dalam mengembangkan bakat yang di miliki.		
	2. Indikator dan Target Kinerja 100%		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 860.787.299		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pemilihan Uda dan Uni Kabupaten Pesisir Selatan	
		Masukan	Rp 350.000.000,-
		Keluaran	Terlaksananya Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
		Hasil	Uda dan Uni terpilih nantinya akan mampu mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan guna meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir selatan

Painan, Juni 2019

Kepala OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hadi Susilo, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
KODE PROGRAM	1.01.01.1.01.01.01.01.16.14		
KEGIATAN	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi		
HASILOUTPUT	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan -Jumlah sekolah SD se Kabupaten Pesisir Selatan adalah 392 unit sekolah -Jumlah siswa SD keseluruhan adalah 57.200 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 29.862 orang dan siswa perempuan 27.338 orang - Jumlah SD yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 422 unit , WC laki-laki = 189 unit dan WC Perempuan =233 unit 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : -Belum seluruh sekolah mendapatkan akses sarana air berih dan sarana sanitasi, - Masih kurangnya partisipasi siswa dalam menjaga pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi, - Kurangnya pengawasan oleh dinas dan sekolah akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi; b. Penyebab internal : - Kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi (WC) bagi siswa perempuan dan laki-laki; c. Penyebab External :- Sebagian kepala sekolah belum melaporkan/mengusulkan akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi yang responsif gender; -Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan gutu tentang persoalan gender		
RENCANA AKSI	Komponen	1. Pembangunan sarana air bersih dan sarana sanitasi di seluruh sekolah 2. Sosialisasi kepada kepala sekolah tentang kesetaraan gender dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya WC 3.Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	
		Tujuan	Seluruh siswa SD di Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan yang baik yang responsif gender
		Alokasi Anggaran	RP. 100.000.000,-
		Total Anggaran	RP. 100.000.000 ,-
Capaian Program	1. Tereviewnya rancang bangun WC untuk anak laki-laki dan perempuan 2. Terpenuhinya Kebutuhan Sanitasi dan air bersih seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan 3. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak		

Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan,

SUHENDRI,S.Pd,M.Si
NIP.196707231995121001

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
KODE PROGRAM	1.01.01.1.01.01.01.01.20		
KEGIATAN	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD		
HASILOUTPUT	Meningkatkan kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan -Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan sebanyak 400 orang, yang terdiri dari peserta laki-laki : 83 orang dan perempuan : 317 orang -Jumlah Guru SD di Kabupaten Pessel = 5.457 orang dan Jumlah Guru SD yang belum mengikuti Bimtek = 5.057 orang 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : -Sebagian besar guru SD yang akan melatih peserta siswa OSN belum mengikuti bimtek – Masih ada guru SD dalam mendampingi peserta OSN yang belum maksimal – Kurangnya fasilitas dari Dinas untuk melaksanakan bimtek – Belum maksimalnya guru SD dalam menerima pelatihan bimtek untuk mendampingi anak b. Penyebab internal : - Pimpinan dalam pemerataan penempatan guru masih kurang optimal, - Belum menjadi skala prioritas kegiatan c. Penyebab External :- Terbatasnya kemampuan Akademis guru dalam membimbing siswa peserta OSN		
RENCANA AKSI	Komponen	1. Advokasi dan sosialisasi bagi SDM tentang pentingnya PUG 2. Pelaksanaan bimtek bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
		Tujuan	Meningkatkan kompetensi guru dalam persiapan pembinaan siswa peserta lomba OSN tingkat kecamatan dan kabupaten
		Alokasi Anggaran	RP. 427.618.700
		Total Anggaran	RP. 427.618.700
Capaian Program	1. Tersosialisasinya bagi SDM tentang pentingnya PUG 2. Meningkatnya kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten		

Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUHENDRI,S.Pd,M.Si
NIP.196707231995121001

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
KODE PROGRAM			
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Keterlibatan Kaum Laki-laki dalam pengelolaan bank sampah sangat sedikit c. Belum berimbangnya penggunaan tenaga harian laki laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan Bank Sampah		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Akses 1. Pengelolaan bank sampah membuka peluang kerja bagi kaum laki laki Partisipasi 1. Belum bisanya bank sampah menjadi mata pencarian utama karena laki-laki sebagai tulang punggung belum bisa menggantungkan hidupnya di bank sampah Kontrol 1. Belum jelasnya pemasaran hasil Bank Sampah Manfaat 1. Pengelolaan Bank Sampah bukanlah pekerjaan perempuan saja. **b. Penyebab Internal** 1. Kurang pedulinya kaum laki-laki terhadap pengelolaan sampah melalui kegiatan bank sampah; **c. Penyebab Eksternal** 1. Kurangnya pemahaman manfaat pengolahan sampah melalui bank sampah bagi kaum laki-laki		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Terbukanya lapangan pekerjaan bagi kaum laki-laki dalam menambah pendapatan keluarga		
	2. Indikator dan Target Kinerja Meningkatnya income keluarga sebesar 50 %		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 2.00.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Pengelolaan Bank Sampah	
		Masukan	Rp. 2.00.000.000,00
		Keluaran	Jumlah Bank Sampah Yang Terkelola dengan baik 11 Unit
		Hasil	Jumlah kaum laki-laki yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup

An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Sekretaris

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Beny Rizwan, SH.MSi
Nip. 19671019 199308 1 001

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
KODE PROGRAM			
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Keterlibatan Perempuan / Ecofeminisme dalam pembangunan terutama pengelolaan lingkungan masih kecil		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Akses 1. Pelatihan keterampilan pengelolaan sampah membuka peluang kerja bagi perempuan Partisipasi 1 Rendahnya partisipasi perempuan dalam mengikuti pelatihan 2. Rendahnya minat perempuan dalam pengelolaan sampah Kontrol 1. Belum jelasnya pemasaran hasil Pengelolaan Sampah 3R yang dilakukan Manfaat 1. Pengelolaan Sampah bukanlah pekerjaan perempuan semata. **b. Penyebab Internal** 1. Pelatihan pengelolaan sampah dianggap tidak bermanfaat 2. Waktu luang bagi perempuan untuk mengikuti pelatihan terbatas karena padatnya pekerjaan rumah tangga **c. Penyebab Eksternal** 1. Masih rendahnya pemahanan bahwa pengelolaan sampah dapat menambah ekonomi keluarga		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Terbukanya lapangan pekerjaan bagi perempuan dalam menambah pendapatan keluarga		
	2. Indikator dan Target Kinerja Meningkatnya peran serta perempuan dalam menambah income keluarga sebesar 10 %		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Pelatihan Keterampilan pengelolaan sampah 3R	
		Masukan	Rp. 50.000.000,00
		Keluaran	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan pengelolaan sampah 3R sebanyak 40 orang
		Hasil	Jumlah perempuan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Painan, Mei 2019
An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sekretaris

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BEMY RZWAN, SH.MSi
Nip. 19671019 199308 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Opd : **Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**
Tahun Anggaran : **2020**
Program : **Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**
Kegiatan : **Pembangunan Penerangan Jalan Umum**

PROGRAM			
KODE PROGRAM	**1.02.09.1.02.09.01.17.**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** 1. Penerangan jalan umum yang telah terpasang sebanyak 283 ID Pel 2. Panjang jalan di Kabupaten Pesisir Selatan - Jalan Nasional 223,50 Kilometer - Jalan Propinsi 67,90 Kilometer - Jalan Kabupaten 2.323,38 Kilometer		
	3. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Akses: Belum meratanya pembangunan penerangan jalan umum di Kabupaten Pesisir Selatan Partisipasi : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga penerangan jalan umum yang tersedia. Kontrol Masih kurangnya pengawasan terhadap penerangan jalan umum yang telah terpasang Manfaat Belum seluruhnya masyarakat yang mendapat manfaat dari Penerangan jalan umum **b. Penyebab Internal** - Tidak terakomodirnya seluruh permintaan masyarakat akan penerangan jalan umum - Tidak tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan pada bagian Penerangan Jalan umum - Tidak Tersedianya Titik Koordinat penerangan jalan umum yang telah terpasang. **c. Penyebab Eksternal** - Banyaknya permintaan masyarakat akan penerangan jalan umum - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga penernagan jalan umum		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		
	2. Indikator dan Target Kinerja Persentase Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 14.729.400.000,- (empat belas miliyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	
		Masukan	Rp. 5.000.000.000,-
		Keluaran	Tersedianya PJU sebanyak 23 paket
		Hasil	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan masyarakat

Painan, 12 Juni 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19708[illegible]99101 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Opd : **Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**
Tahun Anggaran : **2020**
Program : **Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**
Kegiatan : **Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan lalu Lintas**

PROGRAM	
KODE PROGRAM	**1.02.09.1.02.09.01.17.**
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** 1. Peraturaturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 Tentang Rambu lalu Lintas 2. Jumlah Rambu- rambu lalulintas : 948 buah 3. Warning light 5 buah 4. Traffic light 4 buah 5. Guard rail 5 paket 6. Jumlah kendaraan di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 104.388 Unit 7. Jumlah kecelakaan lalu lintas 2 tahun terakhir a. 2017 (265 Kasus) b. 2018 (298 Kasus) 8. Jumlah pelangaran lalulintas 2 tahun terakhir a. 2017 (3.898 Kasus) b. 2018 (3.966 Kasus) 9. Jumlah sekolah yang rawan kecelakaan 15 sekolah (4 Sekolah Prioritas)
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Akses: - Masih diperlukan pengadaan tambahan alat keselamatan lalu lintas. Partisipasi : - Masih banyaknya pengguna jalan yang tidak mamahami fungsi alat keselamatan lalu lintas Kontrol - Kurang pengawasan pemerintah terhadap alat keselamatan yang sudah terpasang Manfaat - Seringnya terjadi kecelakaan di lokasi yang belum terpasang alat keselamatan lalu lintas **b. Penyebab Internal** - Belum menjadi skala prioritas kegiatan terhadap pengadaan alat keselamatan lalu lintas. - Banyaknya rambu lalu lintas yang sudah rusak dan belum diganti. - Belum adanya Zona selamat Sekolah dan Rute Selamat Sekolah **c. Penyebab Eksternal** - Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap alat keselamatan lalu lintas. - Belum terpenuhi permintaan alat keselamatan lalu lintas pada saat pelaksanaan Musrenbang
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
	2. Indikator dan Target Kinerja Persentase Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 14.729.400.000,-** (empat belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	
		Masukan	Rp. 2.879.400.000,-
		Keluaran	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas berupa : a. Rambu - rambu lalu lintas sebanyak 200 buah b. Guard Rail 22 Buah c. Paku Jalan 2000 Buah d. Marka Jalan 8000 Meter e. Warning Light 18 Buah f. Zona Selamat Sekolah 4 Paket
		Hasil	Menurunnya angka kecelakaan lalulintas di Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 12 Juni 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 [illegible]

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
KODE PROGRAM	**3.00.03.02.02.42**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Pessel tahun 2018 terdiri dari: 172.000 NOP PBB-P2 dan 3000 NPWPD yang merupakan dari Wajib Pajak Perorangan, Perusahaan, Rumah makan, Hotel,Pajak hiburan, dan pajak reklame b. Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan mempunyai peranan penting dalam hal Pelayanan Publik. c. Untuk terciptanya kualitas Pelayanan dan terciptanya Sarana dan Prsarana Kantor sesuai standar kebutuhan dibutuhkan prasarana kantor yang representatif. d. Pengunjung wajib pajak perempuan usia subur yang memiliki batita		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **1. AKSES** ❖ Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak yang memadai untuk masyarakat terutama Ibu menyusui. **2. PARTISIPASI** Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan pajak untuk kaum perempuan yang menyebabkan telat bayar. **3. KONTROL** Kurang tersediaanya anggaran sehingga anggaran lebih memprioritaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. **b. Penyebab Internal** Keterbatas anggaran sehingga pembangunan sarana dan prasarana belum menjadi kegiatan Prioritas **c. Penyebab Eksternal** Karena sarana dan prasarana atau ruangan Ibu menyusui menyebabkan Wajib Pajak yang menyusui kurang nyaman untuk melakukan pembayaran pajak.		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Sarana dan prasarana kantor sesuai dengan stardar sarana dan prasarana kantor.		
	2. Indikator dan Target Kinerja **KEGIATAN 1** Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung kantor. **Input :** Rp.150.000.000,00 **Output:** Tersedinya Ruang Ibu Menyusui **Outcome :** Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak yang Responsif Gender		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp.150.000.000,00**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor.	
		Masukan	Rp.150.000.000,00
		Keluaran	Tersedinya Ruang Ibu Menyusui
		Hasil	Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak yang Responsif Gender

Painan, 2019
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN

DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003